

Judul : Di saat pemerintah gencarkan efisiensi, pro kontra anggota DPR dapat tunjangan rumah
Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Di Saat Pemerintah Gencarkan Efisiensi Pro Kontra Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah

Pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah. Namun, di tengah efisiensi, ada berbagai tunjangan bagi pejabat yang disorot oleh warganet.

Salah satunya adalah tunjangan rumah dinas bagi seluruh anggota DPR sebesar Rp 50 juta setiap bulan.

Memang, anggota DPR RI periode 2024-2029 tak lagi mendapatkan rumah dinas di Kalibata maupun di Ulujam. Fasilitas rumah dinas dari negara itu, kini dialihkan menjadi tunjangan rumah.

Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan alasan kenapa memilih tunjangan rumah dinas, karena rumah jabatan anggota (RJA) yang diperuntukkan bagi para anggota Dewan sudah tua dan sering rusak. Menurutnya, rumah dinas yang selama ini menjadi fasilitas bagi anggota DPR akan dikembalikan ke negara.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Setneg, karena aset tersebut memang tercatat di Kemenkeu dan Setneg," kata Indra.

Sementara, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan anggota DPR periode 2024-2029 saat ini mendapatkan tunjangan Rp 50 juta per bulan sebagai pengganti dari rumah jabatan anggota (RJA) masih cukup ideal.

"Saya kira make sense lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan nggak dapat (tunjangan perumahan) karena dapat rumah dinas," ujar Adies kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).

Menguatkan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan kebijakan pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan dinilai lebih efisien dibanding mempertahankan rumah jabatan anggota (RJA) di Kalibata, Jakarta Selatan. "Lebih baik tunjangan

perumahan daripada ratusan miliar setiap tahun untuk memperbaiki RJA," tambahnya.

Bagaimana tanggapan anggota DPR lain? Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Fareira enggan berbicara panjang terkait tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR.

Ia terkesan menghindar ketika ditanya soal anggaran 50 juta untuk tunjangan rumah. "Kita menerima yang sudah diputuskan saja," katanya.

Berbeda, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mengemukakan adanya tunjangan rumah bagi anggota dewan sebesar 50 juta per bulan. Baginya, tunjangan sebesar itu menyakiti hati rakyat yang sedang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. "Batalan," desak Misbah.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Misbah Hasan dan Andreas Hugo Fareira mengenai tunjangan rumah dinas anggota dewan, berikut wawancaranya.

ANDREAS HUGO FAREIRA
Wakil Ketua Komisi XIII DPR

Keputusan Negara, Kita Hanya Terima



“Kebijakan tersebut bukan kita yang memutuskan, itu kan negara yang memutuskan.”

Saat ini, lagi ramai terkait tunjangan rumah jabatan sebesar 50 juta bagi anggota DPR. Bagaimana tanggapan Anda?
Ya, itu mesti ditanya ke Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, mereka yang tahu.

Maksudnya kalau dari anggota dewan sendiri, mendingan dapat rumah dinas jabatan atau tunjangan uang untuk rumah?
Kemarin sudah diputuskan. Dan dari dulu saya juga tinggal di rumah

jabatan.

Maksudnya lebih baik dan lebih efisien mana sih, rumah jabatan atau uang tunjangan rumah?
Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Kita hanya menerima apa yang sudah diputuskan.

Selain soal tunjangan rumah, infonya anggota DPR juga mendapatkan tunjangan pajak. Bagaimana?
Saya ini, kita dapat apa, apa yang

kita dapat kita terima aja.

Berarti tunjangan pajak untuk anggota dewan itu benar, berarti? Apa yang kita dapat, ya kita terima. Kebijakan tersebut bukan kita yang memutuskan, itu kan negara yang memutuskan.

Tapi, kalau tunjangan beras itu benar-benar naik gak?
Saya, setiap tahun, setiap bulan juga gak pernah lihat. Dari dulu saya gak pernah lihat soal itu. ■ REN

MISBAH HASAN
Sekjen FITRA

Sakiti Hati Rakyat, Layak Dibatalkan



“Besarnya tunjangan ini dapat membuka potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.”

Apa tanggapan Anda terkait dengan tunjangan rumah dinas DPR hingga Rp50 juta per bulan?
Menurut saya layak dibatalkan.

Apa alasannya?
Tunjangan rumah dinas DPR yang besar dapat memperlebar kesenjangan antara anggota DPR dan rakyat yang mereka wakili. Banyak warga yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Potensi Pemborosan Anggaran di tengah Efisiensi yang digaungkan

pemerintah. Tunjangan rumah dinas DPR ini dapat dianggap sebagai pemborosan anggaran negara yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti percepatan program 3 juta rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

Menurut Anda, apakah tunjangan rumah dinas transparan?
Tunjangan rumah dinas DPR dengan skema lumpsum jelas tidak transparan dan potensi penyalah-

gunaannya tinggi. Belum tentu tunjangan yang diterima untuk kebutuhan rumah (sewa/kontrak) karena tidak ada laporan aktualnya. Dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang masih membutuhkan banyak perbaikan, prioritas anggaran sebaiknya diberikan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Apalagi kinerja dewan saat ini masih tergolong rendah, terutama pada aspek legislasi dan pengawasan anggaran. ■ REN